



► BANTUAN SOSIAL

# Penerima Bansos Terindikasi Judol Wajib Klarifikasi

**DANUREJAN**—Dinas Sosial (Dinsos) DIY menghentikan sementara pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penerima yang terindikasi terlibat judol *online* (judol). Mereka diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi indikasi tersebut.

Lugas Subarkah  
[lugas@harianjogja.com](mailto:lugas@harianjogja.com)

Berdasarkan data Dinsos DIY, total penerima bansos yang terindikasi terlibat judol sebanyak 7.001 orang, dengan rincian Kabupaten Sleman 1.106 orang; Kota Jogja 938 orang; Bantul 1.711 orang; Gunungkidul 2.397 orang; dan Kulonprogo 849 orang.

Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintersih, menjelaskan penyaluran bansos untuk ribuan penerima yang terindikasi terlibat judol tersebut dihentikan sementara. "Penyalurannya dihentikan sementara. Penghentian ini merupakan kebijakan dari Kementerian Sosial RI," ujarnya, Senin (17/11).

Selama penghentian sementara, Dinsos DIY memberikan kesempatan

► Dinsos DIY memberikan kesempatan bagi para penerima yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi.

► Bansos hanya untuk masyarakat yang membutuhkan dan sifatnya tidak selamanya.

bagi para penerima yang terindikasi judol untuk menyampaikan klarifikasi. "Kami memberikan ruang masukan dari masyarakat yang dinyatakan terindikasi judol. Kami meminta Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menginformasikannya ke masyarakat [penerima bansos]," katanya.

Klarifikasi diperlukan karena indikasi tersebut baru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melihat rekening penerima diindikasikan juga dipakai dalam judol. "Artinya, ini yang kami cek benar tidak? Kalau dari hasil transfer terlihat digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan," katanya.

Selain itu, klarifikasi juga masih perlu dipastikan lagi, karena bisa saja mengaku tidak menggunakan uang untuk judol, tapi sebenarnya ada anggota keluarga lain yang

menggunakannya.

"Kalau misalnya dalam klarifikasi penerima bansos mengaku enggak terlibat judol *online*, maka kami juga tidak serta merta menerima begitu saja pernyataan tersebut," katanya.

Ia mencontohkan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya diterima oleh istri, bisa saja suaminya menggunakan untuk judol. "Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata yang berjudol adalah anggota keluarganya. Sama saja, karena yang kami bantu semua anggota keluarga," kata dia.

Ia juga menekankan kepada masyarakat jika bansos hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dan sifatnya tidak selamanya. "Bansos itu sementara, dalam masa krisis sosial. Ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, tidak punya aset, tidak punya pendidikan, itu yang kita bantu," ujarnya.

Ketika sudah mampu lebih mandiri, pemerintah menyediakan program pemberdayaan sosial. "Bagaimana mereka kami dampingi, bagaimana kami gali *skill* mereka. Dia bisa usaha apa, bisa kerja apa. Baru nanti kami bantu, diberi bimbingan teknis," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005